



KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

kombinasi

Edisi ke-74 2019 • www.combine.or.id



**Anugerah Jurnalisme
Warga 2019, Jer Basuki
Mawa Desa**

ISSN 0852-1190



9 770852 119007

Petunjuk Cara Baca

saran untuk membaca Majalah e-Kombinasi

Majalah elektronik ini dirancang untuk bisa nyaman dibaca menggunakan gawai dengan beragam merek maupun versi. Untuk menambah kenyamanan membaca, silakan mengikuti petunjuk berikut :

- Buka majalah e-Kombinasi dengan aplikasi baca buku elektronik di gawai anda
- Sejumlah aplikasi akan langsung menampilkan isi majalah sesuai layar gawai anda tanpa melalui pengaturan khusus
- Jika aplikasi baca yang anda gunakan tidak langsung menampilkan isi majalah sesuai layar gawai anda, silakan masuk ke pengaturan aplikasi tersebut
 1. Klik bagian Pembesaran
 2. Pilih Paskan ke Layar (*Fit to Width*)
 3. Gunakan pengaturan pengguliran vertikal

Selamat membaca!

kombinasi

KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

Pemimpin Redaksi	Ferdhi F. Putra
Redaktur Pelaksana	Lamia Putri Damayanti
Tim Redaksi	Lamia Putri Damayanti
Kontributor	Anton Muhajir, Didiek Harahab, Iin Valentine, Luh De Suriyani, dan Tunggul Harwanto
Tata Letak	Adji Satria
Infografis	Aris Harianto
Foto	Dokumentasi CRI dan Balebengong
Komik	Aliem Bakhtiar
Sampul Depan	Hamzah
Sekretariat	Ulfa Hanani
Distribusi	Rani Soraya Siregar, Sarjiman

Pernyataan

Semua isi tulisan dari para kontributor yang diterbitkan dalam majalah ini menjadi tanggung jawab masing-masing kontributor. Isi majalah menggunakan lisensi CC BY NC 4.0 sehingga boleh dipublikasikan ulang, diperbanyak, maupun diedarkan sepanjang mencantumkan sumber dan nama penulis serta tidak digunakan untuk komersial.



Combine Resource Institution (CRI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang beritikad mendorong terciptanya warga berdaya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, melalui pengelolaan informasi berbasis komunitas. Kami mendorong penguatan institusi dan jejaring warga, serta kapasitas komunitas di bidang informasi tata kelola sumber daya. Kami juga mengembangkan pengetahuan dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi serta komunikasi.

Daftar Isi



- 5 Editorial**
- 9 Utama** Mengapresiasi Warga yang Mau Berbagi Informasi
- 20 Utama** Kelas dan Anugerah Jurnalisme Warga, Alat Sekaligus Ruang Warga Bersuara
- 30 Utama** Semakin Pentingnya Jaminan Perlindungan Hukum bagi Media Komunitas di Era Internet
- 41 Galeri Anugerah Jurnalisme Warga 2019**
- 47 Media** Jurnalisme Warga Layak Diapresiasi
- 51 Lumbung Komunitas** Penghargaan Kabupaten Literasi, Untuk Siapa
- 58 Lumbung Komunitas** Memandang BaleBengong dari Kaca Mata Saya
- 67 Warta CRI** SID Berdaya di Gunungkidul untuk Menuju Satu Data Kemiskinan
- 73 Warta CRI** Memberdayakan Kelompok Perempuan melalui Lokakarya Keamanan Digital

Editorial



Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2019 tuntas digelar pada Juni silam. AJW merupakan gelaran penting dalam upaya mendorong ekosistem media dan informasi yang lebih sehat di Indonesia.

Untuk pertama kalinya, kami terlibat dalam penyelenggaraan AJW, gelaran rutin yang diprakarsai oleh media jurnalisme warga BaleBengong yang bermarkas di Denpasar, Bali. AJW merupakan sebuah bentuk apresiasi terhadap warga biasa yang memproduksi informasi baik secara individual (pewartanya) maupun kolektif (media komunitas) di Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa kami terlibat dalam gelaran AJW kali ini. Pertama, sejak awal berdiri, kami berkomitmen untuk

mendorong keberadaan media-media yang dipelopori oleh kelompok warga. Bagi kami, jurnalisme warga dan media komunitas merupakan elemen penting dalam upaya menjaga demokrasi; keberagaman konten, keberagaman kepemilikan, dan tentu saja suara-suara alternatif. Kedua, tidak banyak gelaran sejenis di Indonesia. Bahkan boleh jadi AJW merupakan satu-satunya ruang apresiasi terhadap kerja-kerja jurnalis warga dan media komunitas di Indonesia.

Dahulu pernah ada penghargaan Kusala Swadaya yang diinisiasi oleh LSM Bina Swadaya, namun tampaknya berhenti pada 2015. Kusala Swadaya merupakan penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang telah berinisiatif dan kreatif melakukan upaya-upaya peningkatan keberdayaan masyarakat, baik melalui aktivitas di berbagai bidang. Salah dua kategorinya adalah kategori media dan kategori penulis, terutama jurnalis warga.

Langkanya apresiasi terhadap kerja-kerja jurnalis warga dan media komunitas di Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya pengakuan--dan pengetahuan--terhadap keberadaan entitas ini. Media komunitas masih disalahkaprahi sebagai media massa kebanyakan yang berorientasi profit. Lebih menyedihkan, di era ketika disinformasi dan misinformasi merajalela, media komunitas dan jurnalis warga kerap dikambinghitamkan sebagai penyebar hoax, hanya karena dianggap orang/media tersebut bukan profesional dan tidak berbadan hukum. Padahal profesionalitas (kemampuan

bertindak secara profesional--bukan profesi) tidak melulu ditentukan oleh sertifikasi oleh otoritas. Tidak jarang praktik media arus utama, yang dianggap profesional, juga menyimpang dari prinsip dan kode etik jurnalistik. Yang perlu diingat, jurnalisme warga bukan barang baru di Indonesia. Sejarah mencatat, praktik jurnalistik yang dilakukan warga biasa dengan beragam profesi--bukan hanya wartawan--bahkan sudah ada sejak Indonesia masa pra-kemerdekaan (Adam, 1995).

Maka semestinya, nila setitik tidak membuat rusak susu sebelanga. Keberadaan media dan pewarta warga abal-abal memang tidak bisa dimungkiri, dan patut dieliminasi. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan keberadaan media-media warga (media komunitas, media jurnalisme warga, pers mahasiswa, media alternatif, dan sejenisnya) yang berkomitmen pada kemaslahatan warga, yang hadir untuk membuat iklim media lebih demokratis dan beragam. Yang perlu ditegaskan adalah tujuan dari kehadiran media komunitas dan jurnalisme warga, yang hadir untuk turut menjaga marwah jurnalisme yang independen, loyal pada kepentingan publik, dan tentu saja, kebenaran.

Pada gelaran AJW 2019, ada tiga kategori apresiasi, yakni pewarta warga, media warga dan pegiat literasi digital. Dari tiga kategori tersebut, sebanyak 111 individu/kelompok yang mendaftar, yang terdiri dari 31 kelompok media warga, 31 individu pewarta warga, dan 49 individu/kelompok pegiat literasi digital. Tidak hanya penyerahan anugerah,

AJW 2019 juga diisi dengan diskusi penting yang melibatkan parapihak untuk membahas persoalan perlindungan hukum bagi media komunitas dan jurnalis warga.

AJW adalah ikhtiar yang patut didukung. Dengan adanya kegiatan semacam ini, publik dan pengambil kebijakan diharapkan mau menengok dan memberi perhatian lebih pada entitas ini. Dan yang juga penting, AJW dapat menjadi ajang silaturahmi jurnalis warga dan pegiat media komunitas yang selama ini hanya bermain di “bawah tanah” (*below-the-radar*). Sudah saatnya mereka tampil ke permukaan dan membangun jejaring untuk dapat saling menginspirasi dan menguatkan. Meminjam slogan yang kerap kita temui di momen aksi, “media komunitas bersatu, tak bisa dikalahkan!”

U T A M A

Mengapresiasi Warga yang Mau Berbagi Informasi

Anton Muhajir

Jurnalis. Blogger. Pegiat Literasi Digital

Perjuangan tiga tuna netra itu berlipat ganda. Tidak hanya berjalan dengan kemampuan melihat yang terbatas (*low vision*), mereka juga harus menuruni jalan dengan sekitar 1.200 anak tangga. Tidak ada fasilitas inklusif untuk tuna netra seperti mereka. Mereka hanya berpegangan pada pagar pembatas di tengah sebagai penunjuk jalan.

Sugihermanto, video blogger (*vlogger*) dengan satu mata buta, membuat rekaman perjalanannya bersama dua tuna netra lain itu bermodal ponsel. Sesekali dia menggunakan gaya *swavideo*. Di gambar lain dia lebih banyak menggunakan sudut pandang ketiga, dua temannya jadi narasumber.

Sugihermanto tak hanya merekam susahnyanya perjalanan ke air terjun Dolo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur itu. Layaknya jurnalis, dia juga kemudian mengunggah video berdurasi 6 menit 22 detik itu ke saluran YouTube-nya, *Mlaku-mlaku*, pada 11 Oktober 2019 lalu. Video berjudul *Air Terjun Dolo, Sengsara Membawa Nikmat* itu menambah 28 video lain yang sudah diunggah sejak 7 Februari 2017.

Seperti namanya, saluran *Mlaku-mlaku*, dari bahasa Jawa yang berarti jalan-jalan,

memang berisi video perjalanan Sugihermanto ke banyak tempat. Namun, video itu tak sekadar perjalanan biasa. Sugihermanto sebagai penyandang *low vision* juga seringkali menyisipkan pesan kepada pemirsa tentang betapa tidak ramahnya fasilitas publik pada difabel seperti mereka.

Video lainnya, berjudul *Pantai Parangtritis, Keindahan dalam Kegelapan*, menceritakan perjalanan laki-laki asal Surabaya, Jawa Timur itu ke pantai paling populer di Yogyakarta. Serupa video jalan-jalan ke Kediri, video di Parangtritis itu juga memperlihatkan hal serupa, kurang inklusifnya tempat wisata kepada penyandang tuna netra.

Bagi saya, hal menarik dalam video-video Sugihermanto adalah karena dia mempertemukan dua hal yang sebenarnya agak muskil bersanding, keindahan dan kebutaan. Sebagai penyandang *low vision*, Mas Sugik, panggilan akrabnya, justru memerlihatkan indahnya berbagai lokasi wisata sekaligus berusaha membuka mata lebih banyak orang tentang betapa tidak ramahnya tempat-tempat itu pada kelompok difabel.

Bukan hanya saya yang menganggap video-video Mas Sugik istimewa.

Pada akhir Juni 2019 lalu, tiga juri Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2019 lalu memberikan nilai terbaik bagi video perjalanan Mas Sugik ke Pantai Parangtritis. Ketiga juri, pegiat media warga Ahmad Nasir, sutradara dan videografer Dandhy Dwi Laksono, dan editor BaleBengong Luh

De Suriyani, sepakat menjadikan karya Mas Sugik sebagai juara pertama dalam AJW 2019 kategori video.

Video itu dianggap memberikan informasi terbaik tentang bagaimana susahnya komunitas difabel mengakses layanan publik, termasuk objek wisata. Karena itulah dia dianggap istimewa. Dia datang dari mereka yang mengalami sendiri dan selama ini kurang mendapat tempat di media arus utama, yakni kelompok difabel.



Dalam sebuah pelatihan jurnalisme warga untuk teman-teman difabel di Denpasar, Bali pada awal Oktober 2019 lalu, video karya Mas Sugik menjadi salah satu contoh bagaimana kelompok difabel bisa ikut bersuara melalui media warga. Baik secara personal maupun melalui komunitas. Ketika difasilitasi, teman-teman difabel bisa menyampaikan informasi dari sudut pandang berbeda. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan media-media arus utama.

Karena itu, kelompok difabel juga perlu terlibat dalam memproduksi informasi. Alasannya antara lain karena informasi tentang isu difabel masih sangat terbatas di Internet, terutama dari perspektif mereka. Sudah saatnya komunitas difabel tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga turut memproduksi informasi itu sendiri, seperti Mas Sugik.

Perspektif Berbeda

Di tengah terbatasnya informasi tentang komunitas difabel di Internet, video Mas Sugik layak mendapatkan apresiasi. Dan, itulah salah satu alasan kenapa kami mengadakan AJW sejak 2016 lalu.

Kami memulai AJW empat tahun lalu dengan niat memberikan apresiasi pada karya-karya warga yang terbit di *BaleBengong*. Kami melihat bahwa seiring kian banyaknya warga yang berpartisipasi dalam produksi informasi melalui media jurnalisme warga, perlu juga ada upaya mengapresiasi karya-karya mereka. Harapannya, warga makin terlibat dalam jurnalisme warga.

Saat itu kami memulai dalam bentuk kompetisi bertema Menyuarakan yang Tak Terdengar. Nama kegiatannya masih *keminggris*, *Citizen Journalism Award*. Tema itu merujuk pada niat agar makin banyak warga mau menyampaikan informasi-informasi tentang isu menarik di sekitar mereka, tapi belum banyak diketahui publik.

Sebagai awalan, AJW 2016 hanya berlaku untuk Apresiasi pada kontributor

BaleBengong, media jurnalisme warga yang kami kelola sejak 2007. Hal menyenangkan dari proses itu adalah ternyata banyak juga warga yang mau berpartisipasi. Tidak hanya kontributor yang selama ini sudah ikut, tetapi juga teman-teman baru. Mereka menuliskan ceritanya seperti yang kami harapkan. Bukan cerita-cerita besar, narasi-narasi yang hanya ada di media arus utama, tetapi juga petani, difabel, lansia, dan seterusnya.

Penghargaan terbaik adalah cerita tentang warung seorang nenek di Batubulan, Gianyar. Kawasan tetangga Kota Denpasar ini berubah dari waktu ke waktu. Dulunya sebagai sebuah desa, saat ini sudah menjadi daerah urban. Perubahan ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial secara budaya. Dia mengubah pola interaksi warga di desa itu.

Salah satu peserta AJW 2016 menuliskan tentang perubahan itu. Bagaimana warung seorang nenek, dalam bahasa Bali disebut *dadong*, menjadi tempat untuk melihat perubahan-perubahan. Jalan utama yang makin susah dilewati seiring pelebaran menjadi jalan raya sehingga mengubah interaksi warga. Warung-warung kecil berganti toko-toko besar milik warga desa tetangga.

Cerita berjudul *Suara Berbeda di Warung Dadong Koda* itu bisa melihat bagaimana pembangunan fisik berdampak terhadap relasi sosial dari kacamata warganya sendiri. Cerita sehari-hari yang tak banyak terdengar di antara hiruk pikuk arus utama saat ini. Topik yang selama ini menjadi cerita utama di *BaleBengong*.

Cerita-cerita serupa pula yang berikan penghargaan ketika mengadakan AJW pada tahun kedua, 2017. Cerita-cerita dari akar rumput berdasarkan sudut pandang warga tentang cerita-cerita baik di sekitar mereka. Bedanya, kami tidak hanya membuka AJW untuk kontributor di Bali, tetapi juga mengajak media-media komunitas lainnya di Indonesia. Kami ingin memperluas apresiasi karena melihat media seperti *BaleBengong* semakin banyak di berbagai pelosok negeri.

Ada sebelas media komunitas terlibat dalam AJW 2017 yang bertema *Bhinneka Tunggal Media, Merayakan Keberagaman Indonesia Melalui Jurnalisme Warga*. Mereka adalah *Lingkar Papua* (Papua), *Kampung Media* (Nusa Tenggara Barat), *Kabar Desa* (Jawa Tengah), *Plimbi* (Bandung), *Kilas Jambi* (Jambi), *Tatkala* (Bali), *Nyegara Gunung* (Bali), *Nusa Penida Media* (Bali), *Sudut Ruang* (Bengkulu), *Peladang Kata* (Kalimantan Barat), dan *Noong* (Bandung).

Peserta AJW bebas mengirimkan karyanya ke media-media tersebut. Tidak harus ke *BaleBengong* sebagaimana pada AJW tahun sebelumnya.

Pencapaian pada tahun kedua ini, menurut saya, adalah karena AJW sebagai penghargaan tahunan untuk pewarta warga makin dikenal. Tidak hanya di Bali, tetapi juga beberapa daerah. Kami juga bisa memperluas jaringan ke media-media komunitas lain di Indonesia, meskipun sebagian mereka juga saat ini sekarat atau bahkan sudah tidak terbit lagi.

Memperdalam Cerita

Pada tahun ketiga, kami mengubah lagi format AJW. Dari sebelumnya sebagai kompetisi cerita para warga, kami mengubahnya menjadi ajang beasiswa untuk liputan-liputan mendalam. Saat itu kami jengah dengan maraknya berita pemburu klik (*clickbait*) yang menyajikan sensasi dan kedangkalan. Di sisi lain, media-media jurnalisme warga juga justru mendapat tuduhan sebagai media penyebar kabar-kabar dusta (*hoax*).

Kami yakin jurnalisme warga bisa lebih baik. Tidak hanya melawan maraknya hoax, tetapi juga menyampaikan kedalaman. Bentuknya kemudian kami buat dalam bentuk beasiswa liputan tentang topik-topik khusus di Bali. Tetap dari akar rumput.

Ada sekitar 30 ide liputan tentang tema beragam, seperti pertanian berkelanjutan, wisata bahari, mitigasi bencana, dan konservasi kawasan perairan. Dari situ kami memilih lima kelompok pewarta warga yang kemudian membuat laporan mendalam bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (ornop) pelaksana program yaitu WWF Indonesia, Conservation International Indonesia, Mongabay Indonesia, dan Yayasan Kalimajari.

Proses ini lebih menantang. Karena tak sekadar menilai karya-karya yang sudah ada, tetapi juga mendampingi para pewarta warga mulai dari perencanaan, peliputan, pembuatan cerita, perbaikan, sampai penerbitan. Namun, hasilnya juga lebih menyenangkan. Ada lima laporan mendalam

tentang cerita-cerita sukses di akar rumput meskipun masih fokus di Bali.

Hal yang kami pelajari dari sana adalah bahwa pewarta warga yang sering dianggap amatir itu pun bisa menghasilkan karya-karya jurnalistik bermutu. Melalui liputan mendalam, pewarta warga yang sebagian besar mahasiswa dan pelajar SMA ini, bisa menampilkan cerita detail, panjang, dan tentu saja berasal dari akar rumput. Sesuatu yang makin langka, terutama di media daring arus utama.

Tahun ini, AJW kami laksanakan dengan dukungan dari Combine Resource Institution (CRI), lembaga di Yogyakarta yang fokus pada pengelolaan informasi terutama di desa-desa. Bentuknya kembali pada kompetisi untuk media-media warga, bisa media jurnalisme warga ataupun media komunitas, dalam format teks, video, ataupun radio. Kami juga memberikan penghargaan untuk media warga dan komunitas pegiat literasi digital.

Untuk pertama kali pula kami mengadakan pertemuan media warga di Bali membahas perlunya perlindungan hukum bagi media warga. Hal ini karena kami melihat makin banyak warga Internet (warganet) yang dikriminalisasi karena ekspresi mereka di Internet. Tidak sedikit di antaranya dari media-media yang belum bersertifikasi.

Pembelajaran dan Tantangan

Dari empat tahun pelaksanaan AJW, kami belajar banyak hal. Pertama, dalam konteks media jurnalisme warga, sebenarnya banyak

media jurnalisme warga di Indonesia ini yang aktif di masing-masing komunitasnya. Media warga ini, dalam bahasa kami dan teman-teman CRI, adalah media yang dikelola warga, tentang warga, dan untuk warga. Mereka tidak dimiliki korporasi ataupun parpol. Tujuannya lebih banyak untuk pendidikan dan penyebaran informasi. Bukan media yang tujuannya bisnis seperti halnya media media arus utama saat ini.

Kami sempat membuat survei juga. Ada 40-an media warga yang terdata. Belum lagi yang mungkin tidak terjangkau oleh kami. Mereka relatif menyebar di hampir semua daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Flores, sampai Papua. Media-media semacam ini banyak tumbuh di antara kian banyaknya pula media-media berorientasi bisnis.

Kedua, warga juga sebenarnya dengan senang hati terlibat memproduksi karya jurnalistik bermutu kalau ada yang memfasilitasi seperti halnya AJW. Ruang-ruang semacam ini bisa menjadi saluran bagi warga untuk bersuara ketika media arus utama itu semakin dikuasai oleh elite, baik itu elite politik maupun elite ekonomi.

Ketiga, banyak sekali cerita menarik di sekitar kita yang kita anggap tidak penting, tetapi bisa menjadi bagian dari pelajaran kita sehari-hari. Misalnya keberhasilan petani kakao di Jembrana, Bali untuk menghasilkan kakao berfermentasi atau kelompok marjinal seperti Mas Sugik.

Nah, berita-berita baik semacam itu bagaimanapun juga membutuhkan partisipasi

warga, karena kita tahu media arus utama terbatas ruang dan kemampuannya meski mereka memiliki modal besar. Kalau kita melibatkan lebih banyak warga, maka akan makin banyak suara bisa menjadi informasi tambahan melengkapi apa yang ada di media arus utama.

Tantangannya sekarang, kegiatan semacam AJW ini juga bukan hal mudah. Perlu konsistensi dan sumber daya besar. Karena itu perlu dukungan para pihak, misalnya korporasi atau pemerintah, tetapi dengan catatan tidak ada titipan sponsor yang terlalu mendikte. Dengan demikian AJW tetapi bisa berlangsung konsisten dan menjadi ruang penghargaan bagi jurnalisme berkualitas yang dibuat para pewarta warga di Indonesia.

U T A M A

Kelas dan Anugerah Jurnalisme Warga, Alat Sekaligus Ruang Warga Bersuara

Luh De Suriyani

*Ibu dengan dua anak, tinggal di pinggiran Denpasar.
Menjadi jurnalis freelance sejak mahasiswa dan
relawan media jurnalisme warga Balebengong di Bali.*

Gudang kecil *BaleBengong* di Denpasar Utara disesaki 20 orang. Itu adalah Kelas Jurnalisme Warga awal di tahun pertamanya pada 2010. Undangan disebar maksimum untuk 15 orang peserta saja, sisanya fasilitator. Duduk lesehan beralas tikar bambu.

Setelah setahun berlangsung di gudang dan gratis, Kelas Jurnalisme Warga membuka permintaan untuk dikunjungi di desa atau komunitasnya. Syaratnya cukup menyediakan konsumsi untuk peserta dan fasilitator.

Pertemuan-pertemuan kelas selalu membuahakan cerita berbeda, saking beragamnya latar belakang peserta. Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, PNS, dan lainnya, bergabung dalam lingkaran diskusi dan praktik mengenal dasar jurnalistik. Membedakan fakta dengan opini, 5W+1H, dan mengembangkan kerangka tulisan. Hal-hal dasar yang biasa dibahas di kelas-kelas jurnalistik dasar, namun dengan penekanan fokus pada hal-hal sekitar kita, dan sudut pandang penulis sendiri. Itulah yang membedakan jurnalisme warga dengan praktik jurnalisme profesional di media-media *mainstream*.

Karena itu, tak sedikit alumni Kelas Jurnalisme Warga yang melamar jadi wartawan di sejumlah media-media di Bali atau jaringan

Jakarta, mengandalkan ilmu dari kelas yang tidak memberikan sertifikat ini. Tak banyak media yang memberikan bekal pelatihan dasar jurnalistik bagi jurnalis pemulanya.

Balebengong juga membuka ruang kolaborasi untuk LSM atau lembaga yang tertarik menggunakan metode Kelas Jurnalisme Warga sebagai alat menggalang partisipasi warga. Lokasinya di wilayah-wilayah dampingan program mereka.

Tak hanya suara warga dan juga kontributor baru yang dihasilkan dari Kelas Jurnalisme Warga, namun hasil desa. Ada kerajinan, hasil pertanian, dan laut dari desa-desa yang pernah berkolaborasi dengan program ini.

Pertemuan dengan warga di kelas-kelas jurnalisme warga secara otomatis mendorong perjumpaan selanjutnya. Salah satunya tentang desa. Sejak tahun pertama Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) dihelat, desa-desa lokasi kelas dipertemukan kembali melalui hasil desanya. Para petani dan produsen dari desa berkolaborasi dengan kami dalam Bazar Sembako, strategi promosi sekaligus *fundraising*.

Ada empat sampai lima dusun dan desa jaringan yang terkurasi untuk melengkapi sembako berkualitas, yakni Desa Nyuhtebel (minyak kelapa) dan Purwakerthi (garam laut), dari Kabupaten Karangasem. Dusun Pagi (beras merah) dari Kabupaten Tabanan, dan Dawan (gula kelapa) dari Kabupaten Klungkung.

Pada AJW 2019, warga pun diajak melihat sendiri bagaimana bahan pangan berkualitas itu dihasilkan di desanya langsung. Publik kini harus memiliki tanggung jawab untuk menelusuri asal usul bagaimana sebuah produk dihasilkan, bagaimana, dan suka duka di baliknya. Balebengong mengajak warga mengikuti program Melali Bersama Musisi ke dua daerah, Dusun Pagi dan Desa Nyuhtebe. *Melali* artinya jalan-jalan dalam bahasa Bali. Kenapa musisi sebagai *tagline*? Karena kami yakin, seni adalah medium yang bisa merangkum kemegahan desa dan meresponsnya dalam karya. Dua musisi terpilih adalah mereka yang memiliki keberpihakan pada masalah sosial dan lingkungan.



Kelas Jurnalisme Warga tak menetapkan target muluk, misal jumlah peserta dan jumlah karyanya. Misinya adalah memberi semangat bahwa cerita-cerita sekitar kita dan memiliki kepentingan publik harus disampaikan warga untuk merebut ruang-ruang produksi informasi.

Apakah memenuhi target? Karena ini bukan hitung-hitungan *monitoring* evaluasi ala proyek lembaga donor, kami belum pernah mencatat berapa peserta yang membuat karya, apa saja, dan siapa yang terdampak. Kami kembalikan ke peserta, apakah ada yang berubah dari cara memandang industri informasi, dan tahu ada media yang akan membantu mereka mewujudkan kebebasan berpendapat dan bersuara itu, yakni *Balebengong*.

Perubahan cara pandang merespons media dan informasi adalah suatu yang sangat mendasar. Selama ini media terasa elitis, seperti tak bisa diakses oleh warga. Apa yang terjadi, apa yang penting diberitakan, seolah hanya kekuasaan wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, pengiklan, dan pemilik medianya.

No Neuus Without U. Media Warga Berbagi Cerita. Dua *tagline* yang sering disebar *Balebengong* adalah keyakinan bahwa warga berdaya dengan informasinya. Warga punya hak dan memiliki keterampilan membagi dan meramu informasi publiknya.

Ini dibuktikan sejumlah warga. Ketika mulai memiliki kemampuan mengolah informasi, atau setidaknya yakin dengan haknya, mereka lihai mengabarkan persoalan sekitarnya. Dari inisiatif pribadi melakukan gotong royong, mengorganisir komunitas, sampai mendokumentasikannya melalui medsos, berita, dan video.

Misalnya Nyoman Suastika, warga Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, yang

berjarak sekitar 3 jam berkendara dari Denpasar. Ia seorang pemandu selam, desanya terkenal dengan wisata bawah laut. Jiwanya selalu bergejolak untuk memajukan desanya. Tulisan-tulisannya sangat lekat dengan keseharian, misalnya keresahan dengan rusaknya terumbu karang, bangkai kapal (*shipwreck*) yang jadi titik menyelam populer di Tulamben, sampai makin meningkatnya sampah yang tak terolah. Tak berhenti memaparkan masalah, ia juga mendokumentasikan dan terlibat dalam aksi mengurangi persoalan-persoalan di desa.

Suastika mendorong organisasi pemandu selam yang anggotanya warga sekitar, terlibat dalam sejumlah kampanye pelestarian pesisir. Ia bahkan memfasilitasi lahirnya generasi masa depan, anak-anak peduli sampah, Rare Segara. Inilah cita-cita bangsa. Warga-warga yang peduli, mengabarkan, dan terus bergerak mendekati harapan.

Di tingkat pimpinan desa, ada Kepala Desa Nyuhtebel, Kabupaten Karangasem, yang membuat majalah desa sendiri, *website* desa, melatih warga, dan membuat perpustakaan. Dengan tekun ia bergabung bersama warga mengikuti Kelas Jurnalisme Warga selama dua hari yang dihelat Conversation International (CI) Indonesia, lembaga konservasi internasional yang mendorong pengelolaan pesisir.

Saat praktik menulis, ia membagikan kisah cara pembuatan *virgin coconut oil* (VCO) dari bahan baku kelapa yang berlimpah di desanya. Ini dari pengalamannya membuat pelatihan

kecil bersama sejumlah ibu di desa. Dari sini diketahui jika desa dengan hutan kelapa ini belum percaya diri bahwa mampu mengolah hasil desanya, seperti pembuatan minyak kelapa yang makin banyak ditinggalkan. Hanya sedikit warga yang membuat minyak kelapa, karena minyak sawit kemasan begitu mudah dibeli di warung-warung dekat rumah. Padahal desa ini bernama Nyuhtebel yang bermakna ladang kelapa lebat.

Kelas Jurnalisme Warga bukan tentang pelatihan menulis, membuat blog, atau membuat video ponsel saja. Ini adalah pintu masuk berkenalan dan berjejaring dengan warga dan desanya. Sebuah perkenalan menuju keterhubungan berikutnya.

Apresiasi dengan AJW

Setelah sembilan tahun *online*, pada 2016, Balebengong menghelat Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) pertama.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sloka Institute dan Bali Blogger Community (BBC), kolektif pengelola portal jurnalisme warga ini. Ada empat kategori dalam Anugerah Jurnalisme Warga 2016 yaitu tulisan, foto dan ilustrasi, video, dan suara (audio). Sebanyak 44 karya tulis, video, foto, ilustrasi, dan suara memperlihatkan suara-suara yang tak terdengar di Bali.

Pemenang pertama kategori tulisan adalah I Wayan Willyana, seorang warga Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar. Ia berkisah tentang Dadong Koda dan warungnya yang

menjadi saksi sejarah perubahan sosial dan ideologi di Bali sejak 1965 sampai sekarang. Lewat tulisannya, Wayan berkisah tentang simpatisan partai di masa lalu, dampak peristiwa 30 September 1965 yang membuat warga saling bunuh, hingga tekanan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya saat ini akibat pariwisata massal.

Berikutnya ada anak muda Widyartha Suryawan yang menulis narasi kuasa para orang kaya era Orde Baru. Ia melihat dan merasakan sendiri kegelisahan warga sekitar Bukit Pandawa, Kuta Selatan, dalam menghadapi tekanan akibat cepatnya perubahan geografis dan pembangunan industri pariwisata. Ia bercerita, misalnya tentang pembangunan sebuah lapangan golf yang menyebabkan warga makin sulit mengakses bebukitan yang dulu menjadi tempat bermain dan beternak.

Untuk kategori foto dan ilustrasi pemenangnya adalah seorang ibu: Ivy Candra yang tekun mengasuh putranya yang mengidap autisme untuk mendapat akses pendidikan inklusif. Melalui serial esai foto ponsel ia menulis cerita yang memperlihatkan perjuangan keduanya.

Di kategori audio ada Maylina Triastuti, pelajar SMA 3 Denpasar, yang mengisahkan tentang makin hilangnya generasi muda yang mau bertani di Bali. Adapun di kategori format video karya Hadhi Kusuma menjadi karya terbaik dengan judul "*Slinart, Street Art, dan Eksploitasi Pariwisata Bali.*" Video dari peserta-peserta lain menceritakan hal yang serupa, tentang bagaimana kondisi Bali saat ini akibat

perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk maraknya seni baru di Bali yaitu *street art*.

Salah satu juri, Roberto Hutabarat, aktivis sosial di Bali menyebut, beragam suara dan cara pandang yang diangkat dalam karya jurnalisme warga ini petanda betapa masih banyaknya harapan dan kecerdasan yang muncul dari warga biasa yang hidupnya terbiasa terpinggirkan, marginal dan tertindas. "Suara-suara warga kelas *subaltern* ini pada dasarnya jarang atau bahkan tidak didengar atau tidak mau didengar oleh elite-elite atau kelas-kelas penguasa," katanya.

Penghargaan Warga Bersuara diberikan untuk tiga tokoh yang bersuara pilihan publik. Mereka adalah Kadek Dwi Armika, seniman layangan tradisional Bali yang mengombinasikan material ramah lingkungan dan karyanya banyak dikoleksi museum luar negeri. Kemudian Linda Anugerah, perempuan yang melakukan kerja kemanusiaan dengan reaksi cepat setelah mendapat laporan di sosial media. Berikutnya Ida Bagus Kade Suwartama, Kelian Dusun Masen yang melakukan wujud rekonsiliasi dengan menggali kubur korban pembantaian massal Peristiwa 65 di banjarnya, Kabupaten Jembrana.

Ada juga dialog Musik Bersuara bersama musisi muda Bali yang bersuara lewat lagu, yakni Mr. HIT dan Aya dan Laras duo remaja asal Nusa Penida.

AJW berlanjut tahun-tahun berikutnya dengan sejumlah perubahan sebagai bagian

penjelajahan hal-hal baru sampai menemukan format yang lebih pas. Misalnya, AJW 2017 mengajak 10 media komunitas lain di Indonesia sebagai kolaborator. Tujuannya membuat AJW lebih dikenal, dan pewarta warga di luar Bali juga bisa berpartisipasi. Tema lomba pun lebih umum, tentang kebhinekaan.

Kemudian pada 2018, AJW mengubah format lomba menjadi sayembara liputan mendalam. Bekerjasama dengan sejumlah pihak yang menyumbangkan ide, pendampingan, dan donasi dana hibah liputan bagi warga yang terseleksi proposalnya. Konsep ini hendak meyakinkan warga, mereka mampu menghasilkan karya berkualitas dalam bentuk multi platform. Mengombinasikan teks, video, infografis, foto, dan lainnya.

AJW terakhir pada 2019 membawa berkah karena Combine Resources Institute tertarik berkolaborasi dengan menghelatnya bersama. Sangat memudahkan Balebengong dalam pendanaan, perluasan jangkauan karena pesertanya terbuka untuk seluruh warga Indonesia, dan menguatkan advokasi perlindungan pewarta warga.

Dari perjalanan beberapa tahun AJW, benang merahnya adalah kolaborasi dan semangat untuk menguatkan partisipasi warga.

U T A M A

Semakin Pentingnya Jaminan Perlindungan Hukum bagi Media Komunitas di Era Internet

Lamia Putri Damayanti

Staf Komunikasi Combine Resource Institution

Media komunitas telah memberikan kontribusi positif bagi warga di tengah ekosistem media yang terpusat dan dikuasai oligarki. Kendati demikian, praktik jurnalisme yang dilakukan media komunitas belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Sementara itu, di era internet aktivitas mereka semakin rentan dibungkam dengan UU ITE.

Pada 2016, Fikri M. Sanusi, salah satu pegiat media komunitas Speaker Kampung, pernah mengalami intimidasi dari salah satu perangkat desa di Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kala itu, ia menulis berita mengenai Galian C di desa tersebut. Berita itu ditulis pada tahun 2015 tetapi baru dipermasalahkan oleh perangkat desa setempat satu tahun setelahnya.

Menurut Fikri, ia sempat dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Menanggapi tuntutan tersebut, para pegiat Speaker Kampung disarankan oleh Syairi (alm.), pegiat radio komunitas Primadona FM di Lombok Utara, untuk mengawal kasus tersebut dengan menuliskannya. Tak berapa lama, kasus tersebut pun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. “Kami

sering dianggap menyebarkan informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Padahal kami betul-betul menulis berita dengan benar,” kisah Fikri dalam Diskusi Kelompok Terarah bertema “Merancang Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pewarta dan Media Warga” yang diselenggarakan di Denpasar, Bali pada 29 Juni 2019.

Diskusi Kelompok Terarah tersebut merupakan salah satu rangkaian acara Anugerah Jurnalisme Warga 2019 yang diselenggarakan oleh media komunitas Balebengong dan Combine Resource Institution (CRI). Acara tersebut mengundang berbagai lapisan masyarakat yang aktif memproduksi informasi melalui media seperti, media komunitas, media jurnalis warga, pers mahasiswa, maupun media alternatif yang bergiat di bidang seni dan sastra. Dalam diskusi tersebut, para peserta diajak untuk mendiskusikan pentingnya perlindungan hukum bagi warga yang memproduksi berita tetapi tidak tergabung dalam perusahaan pers (media arus utama).

Selain elemen-elemen tersebut, diskusi tersebut juga dihadiri organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan. Donny BU dan Widuri menjadi salah dua perwakilan OMS dari ICT Watch dan Internet Sehat. Diskusi ini juga sebenarnya mengundang Dewan Pers selaku lembaga yang memiliki wewenang mengawasi praktik jurnalisme di Indonesia. Sayangnya, Dewan Pers tidak dapat hadir.



Sebelum mendiskusikan lebih jauh mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi media komunitas dan jurnalis warga, Direktur CRI Imung Yuniardi memaparkan karakter atau ciri media komunitas. Selama ini, media komunitas masih sering dipertukarkan maknanya dengan media alternatif--padahal tidak semua media alternatif adalah media komunitas. Tidak hanya itu, media komunitas juga kerap dianggap sama dengan media arus utama. "Padahal, sudah jelas posisi media komunitas adalah nonprofit," kata Imung.

Lebih lanjut, Imung menjelaskan enam karakter utama media komunitas, selain tidak berorientasi laba. Pertama, media komunitas biasanya memiliki aktivitas di luar ruang redaksi atau pemberitaan. Hal ini menjadi pembeda utama dari media arus utama karena warga dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas di luar urusan redaksi. "Misalnya saja seperti yang dilakukan oleh Speaker Kampung ketika gempa Lombok tahun lalu (2018) dengan menyelenggarakan kegiatan *trauma healing* untuk warga," katanya.

Ciri kedua adalah media komunitas sebagai bagian dari solusi. Media komunitas tidak

hanya memberitakan persoalan-persoalan yang terjadi di warga, tetapi juga turut menjadi *problem solver* (pemecah masalah). Hal ini, berkaitan erat dengan ciri selanjutnya yaitu kesadaran dan pencerdasan warga. Media komunitas memiliki peran untuk memberikan edukasi bagi warga. Sementara itu, tiga ciri terakhir saling berkaitan erat karena mendorong partisipasi warga dalam media.

Media komunitas dapat menjadi alat bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Sehingga media komunitas pun dapat menjelma menjadi ruang bagi warga. "Ruang ini tidak hanya ruang ekspresi tetapi juga wadah untuk melibatkan warga," papar Imung.

Sayangnya, meski berkontribusi dalam demokratisasi media di level akar rumput, keberadaan media komunitas masih cenderung diabaikan. Pengabaian yang dimaksud adalah adanya aturan dalam Undang-Undang Pers tahun 1999 pasal 9 yang menjelaskan bahwa sebuah (perusahaan) pers harus berbadan hukum. Hal ini menyebabkan hanya perusahaan pers saja yang disebut dalam UU. Sementara itu, media komunitas tidak termasuk bagian dari perusahaan pers karena sifatnya nonprofit dan didirikan dengan sukarela. Hal ini juga berlaku pada media alternatif dan pers mahasiswa yang tidak berbadan hukum.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi media non perusahaan pers menjadi sulit untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Dewan Pers.

Sementara itu, pegiat media non perusahaan pers juga tidak jarang mengalami intimidasi, kekerasan, dan berpotensi dikriminalisasi.

Di era internet, proses produksi informasi oleh warga semakin berkembang pesat. Internet memberikan ruang sekaligus alat bagi warga untuk memproduksi informasi yang relevan bagi mereka dan lingkungan sekitarnya. Hal ini jugalah yang menjadi alasan pegiat media komunitas Balebengong, menyelenggarakan Anugerah Jurnalisme Warga. Kegiatan ini juga bertujuan mengapresiasi warga yang telah giat memberitakan informasi, terutama di era internet.

Kendati demikian, masifnya produksi informasi oleh warga tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan hukum. Meski merupakan produk Reformasi, UU Pers masih belum mengakomodasi keberadaan media komunitas dan jurnalis warga. Sementara itu, warga yang memproduksi informasi dengan pendekatan jurnalistik pun tetap dapat terancam dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman-ancaman lain juga dihadapi oleh pegiat media komunitas, seperti intimidasi dan kekerasan fisik. Pegiat media komunitas Warta Desa, Didiek Harahab, menceritakan bahwa ia beberapa kali menerima ancaman-ancaman melalui SMS, WhatsApp, telepon, dan lain sebagainya. "Meski ancaman tersebut hanya bersifat verbal namun tetap mengganggu," ujar Didiek.

Pegiat Radio Komunitas Marsinah FM, Dian Septi juga mengalami hal yang sama. Radio

Komunitas Marsinah FM adalah media komunitas yang berfokus memberitakan informasi mengenai buruh perempuan, khususnya di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung. Ia mengatakan bahwa posisi buruh di media arus utama kerap disudutkan. Buruh seringkali diberitakan secara negatif oleh media arus utama. Melihat hal tersebut, Dian berpikir bahwa memberikan alternatif atau wacana tanding menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Karena itulah Marsinah FM ada.

Kendati demikian, Dian dan kawan-kawannya di Marsinah FM juga tidak luput mengalami kekerasan atas informasi yang mereka produksi. Mereka kerap mendapatkan ancaman bahkan fitnah di media sosial. Salah satunya adalah tuduhan bahwa Marsinah FM adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Stigma PKI yang terlanjur negatif di Indonesia membuat Marsinah FM pun menjadi dipandang sebelah mata.

Posisi mereka sebagai buruh dan perempuan semakin mudah direpresi. Tidak hanya mendapatkan ancaman verbal melalui media sosial, telepon, SMS, dan pesan instan, pegiat Marsinah FM juga beberapa kali tersandung ancaman UU ITE hingga mendapatkan kekerasan fisik.

Melihat kasus-kasus tersebut, perlindungan hukum bagi pegiat media non perusahaan pers menjadi semakin penting. Sugihermanto, jurnalis warga asal Surabaya yang fokus terhadap isu-isu kelompok disabilitas juga berpendapat bahwa jurnalis warga dan media komunitas seharusnya mendapatkan

perlindungan yang sama dengan jurnalis yang bekerja di media arus utama. Ia mengusulkan bahwa jurnalis warga dan media komunitas juga diakui dalam regulasi kita. “Selain itu, UU ITE seharusnya direvisi, terutama soal pencemaran nama baik,” katanya.

Terkait dengan UU ITE, meskipun memberitakan informasi yang ringan, Sugihermanto mengaku tetap berhati-hati dalam menentukan redaksional. Selama ini Sugihermanto fokus terhadap isu-isu disabilitas, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pariwisata untuk kelompok difabel--sesuatu yang jarang dibahas oleh media arus utama. Meski mengemasnya secara ringan dalam bentuk video, Sugihermanto tetap memasukkan kritik terhadap pemerintah yang masih abai dalam hal menyediakan fasilitas untuk kelompok difabel. “Tetapi sebisa mungkin saya memilih diksi yang tidak menimbulkan konfrontasi,” ujarnya. Hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi UU ITE yang “menghantui” kerja-kerja jurnalistik yang dilakukannya sementara praktik jurnalisme warga belum memiliki payung hukum.

Tidak hanya media komunitas, pers mahasiswa pun tidak jarang mendapat intimidasi. Perwakilan Pers Mahasiswa Akademika dari Universitas Udayana menceritakan intimidasi yang mereka alami, terutama ketika memberitakan isu-isu sensitif di kampus. Salah satunya adalah isu pengembangan institusi atau biasa disebut dengan uang pangkal untuk mahasiswa-mahasiswa baru. “Kami sering mendapatkan intimidasi ketika mencari data dan melakukan wawancara ke narasumber,” jelasnya.

Proses produksi informasi oleh warga tidak bisa diabaikan. Di tengah arus informasi yang terpusat di kota-kota besar, kehadiran informasi oleh warga berkontribusi dalam mendorong demokratisasi media. Warga juga tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada media arus utama, yang meski memiliki modal, tetapi sumber dayanya terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah dan isu, serta berorientasi pada pasar.

Fungsi media komunitas menjadi semakin relevan karena saat ini warga membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka berdaya. Speaker Kampung telah mengambil peran ini karena menyadari bahwa ada tiga masalah di Lombok yang tidak dapat dijangkau oleh media arus utama. Ketiganya adalah hak dasar warga, kesehatan, dan pendidikan. “Masalah-masalah itu banyak terjadi di Lombok, tetapi jarang sekali media arus utama membahasnya,” jelas Fikri.

Salah satu persoalan hak dasar warga yang kerap terjadi di Lombok adalah masalah administrasi kependudukan. “Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan KTP-El. Kami tidak hanya memberitakan isu tersebut, tetapi juga memberikan solusi permasalahan dari KTP-El tersebut. Hal ini juga kami lakukan dengan isu-isu lainnya. Baik itu isu kesehatan maupun pendidikan,” kata Fikri.

Di samping memberikan edukasi kepada warga untuk tidak membuat administrasi kependudukan melalui calo, mereka juga memberikan solusi kepada warga terkait permasalahan tersebut yakni dengan

mendampingi warga yang ingin membuat KTP-El. “Prinsip Speaker Kampung adalah menyuarkan hak warga,” jelas Sanusi atau yang lebih akrab dipanggil Uci, pegiat Speaker Kampung.

Selain itu, ketika gempa terjadi di Lombok pada Juli-Agustus 2018, Speaker Kampung aktif memberikan informasi tentang kondisi dan perkembangan situasi pascagempa. Banyak warga di pelosok yang terisolasi dan tidak mendapat atau memberikan informasi, tentang apa yang harus mereka lakukan. Speaker Kampung berusaha mengisi kekosongan itu dengan melakukan mengelola informasi, terlibat dalam pengelolaan logistik, dan isu-isu mengenai hunian sementara.

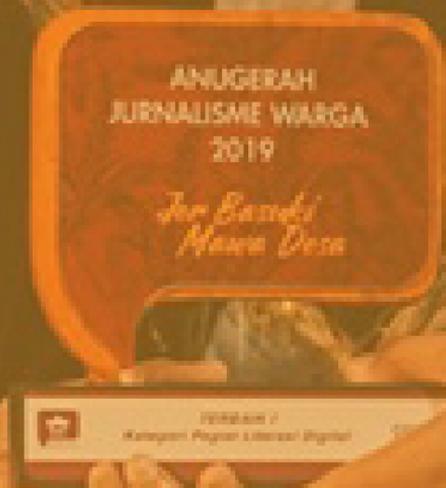
Warta Desa sendiri berfokus memberitakan informasi-informasi yang berkaitan dengan warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Media komunitas yang digawangi oleh Didiek, Eva, dan Buono tersebut telah bergiat sejak tahun 2016. Mereka membangun portal berita yang menginformasikan berita yang relevan dengan warga. Selain itu, Warta Desa juga terdorong untuk mewartakan informasi yang abai diberitakan oleh media arus utama. “Salah satunya adalah isu soal tol di Pekalongan. Tidak ada satupun media yang membuat berita ini (soal isu tol) selain Warta Desa,” ujarnya.

Sama halnya dengan Speaker Kampung, Warta Desa juga kerap melakukan pendampingan kepada warga yang mengalami kesulitan terutama dalam urusan administrasi birokrasi. Dalam kasus tol pun, mereka juga sering

mendampingi warga yang merasa dirugikan oleh pembangunan tol.

Dalam perjalanannya, selain memberikan informasi yang relevan bagi warga, media komunitas juga menjadi bagian dari pemecah masalah. Kegiatan mereka tidak hanya berada di ruang redaksi tetapi juga bergerak bersama warga agar menjadi berdaya. Karakter-karakter inilah yang membuatnya berbeda dari media arus utama. Kendati demikian, aktivitas media komunitas masih belum mendapatkan perlindungan hukum. Padahal, mereka jauh lebih rentan karena posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan media arus utama.

Galeri Anugerah Jurnalisme Warga 2019



ANUGERAH JURNALISME WARGA 2019



Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) merupakan kegiatan tahunan BaleBengong sejak 2016 untuk memberikan apresiasi pada pewarta warga maupun media yang mampu mewakili warga dalam karya-karyanya. AJW 2019 yang mengambil tema "Jer Basuki Mawa Desa" terselenggara atas kerja sama BaleBengong dan Combine Resource Institution (CRI).

PARA NOMINATOR AJW 2019

111

pendaftar

49

individu/kelompok
pegiat literasi
digital

31

pewarta warga

31

media warga

13

provinsi

PARA PENERIMA AJW 2019

Kategori Pewarta
Warga (format artikel)

I Wayan Suardana (Denpasar)

"Peladung, Jejak Awal Mekanisme Adat Menyikapi
Investasi" diunggah di <https://baebengong.id>

Sugihermanto (Surabaya)
"Pantai Parang Tritis, Keindahan dalam
Kegelapan"
diunggah di <https://youtube.com>

Kategori Pewarta Warga
(format video)

Kategori Media Warga (format daring)

wartadesa.net (Pekalongan)

Radio Komunitas Marsinah FM
(Jakarta)

Kategori Media Warga
(format elektronik)

Kategori Literasi Digital

Rumah Literasi Indonesia (Banyuwangi)

*Jer Basuki
Mawa Desa*

*mengabarkan praktik baik dan
inspirasi dari desa*











MEDIA



Jurnalisme Warga Layak Diapresiasi

Didiek Harahab

Pegiat media komunitas Warta Desa Pekalongan

Hadirnya jurnalisme warga yang fokus pada isu-isu desa menjadi angin segar bagi warga untuk memenuhi kebutuhan informasi. Media komunitas seperti Warta Desa di Pekalongan menjadi motor untuk mengabarkan praktik baik dan inspirasi dari desa maupun pelayanan publik bagi warga.

Warta Desa hadir sejak akhir 2016 dan menjadi media komunitas daring (*online*) pertama di Pekalongan yang mengabarkan isu-isu tentang warga (akar rumput) dan desa, dengan *tagline* “Saatnya Warga Bersuara”. Slogan tersebut menjadi acuan bagi para penggiatnya untuk mendorong warga berani bersuara. Meski kebebasan mengeluarkan pendapat diatur oleh undang-undang, bagi warga Pekalongan, Pemasang dan Batang, masih jarang warga secara terbuka mengeluarkan *uneg-uneg*-nya terkait layanan publik dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka.

Sebagai media komunitas, Warta Desa turut menjadi *watchdog* kebijakan-kebijakan publik yang berimplikasi pada akar rumput. Kasus-kasus seperti permasalahan pembangunan jalan tol, rusaknya fasilitas publik jalan kabupaten, penutupan toko modern tak berizin (ilegal), kasus pencemaran lingkungan,

dan lain sebagainya. Para penggiat Warta Desa terus menyuarakan isu-isu tersebut hingga ada penanganan yang komprehensif dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kerja-kerja jurnalisme warga ala Warta Desa dilakukan secara sukarela, tanpa honor maupun imbalan. Meski demikian, keberpihakan kepada akar rumput menjadi acuan utama dalam mengabarkan peristiwa warga. Tentu hal ini dilakukan tanpa meninggalkan kaidah jurnalistik. Apresiasi warga berupa ucapan terima kasih, manakala berita yang ditayangkan telah diselesaikan oleh *stakeholder* menjadi penyemangat untuk berkontribusi lebih. Dalam hal ini, Warta Desa telah berperan aktif sebagai salah satu bagian dari *problem solver* (pemecah masalah) karena aktivitasnya berdampak pada munculnya solusi untuk warga.

Gelaran Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2019 yang dihelat oleh Bale Bengong Bali dengan Combine Resource Institution (CRI) Yogyakarta yang membuka tiga kategori, yakni, Pewarta Warga, Media Warga dan Penggiat Literasi Digital menjadi tambahan semangat bagi relawan media komunitas Warta Desa.

Terpilihnya Warta Desa sebagai pemenang AJW 2019 untuk kategori media warga, memberi kebanggaan tersendiri bagi para penggiatnya. Isu-isu lokal tingkat desa diapresiasi oleh lembaga pemerhati media komunitas seperti Bale Bengong dan CRI. Hal tersebut menandakan bahwa “jurnalisme jalan sunyi” layak diapresiasi.

Apresiasi media komunitas dalam ajang AJW, tentu menjadi kebanggaan warga Pekalongan, Pemalang dan Batang. Warta Desa selama ini menjadi media mereka untuk bersuara. Karya tulisan dan atau video yang ada di laman Warta Desa merupakan produk (karya) warga yang bergabung menjadi relawan, kontributor maupun informan (pemberi informasi) kabar-kabar yang dipublikasikan.

Selain itu, apresiasi dalam AJW menjadi pemicu bagi para penggiat Warta Desa untuk terus berkontribusi menyuarakan akar rumput, meningkatkan kapasitas para penggiatnya, melakukan kaderisasi dan regenerasi jurnalis warga, memperbaiki dan memperkuat pengelolaan media komunitas, dan terus berkomitmen menjadi media *watchdog* bagi kepentingan warga.

L U M B U N G K O M U N I T A S

Membangun **Indone.**
Dari Kampung Halaman

Penghargaan Kabupaten Literasi, Untuk Siapa?

Tunggul Harwanto

Founder Rumah Literasi Indonesia

Gagasan tentang membangun sumber daya manusia adalah suatu ikhtiar yang menjadi kewajiban sebuah bangsa. Narasi tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sudah terlalu sering kita lisankan dan kita dengar, bahkan selalu menjadi janji manis bagi para pejabat hingga para politikus pada masa kampanye. Implementasinya? Jauh panggang dari api, alias banyak yang “ngibul”.

Saya akan memulai sebuah diskusi menarik dari level desa. Salah satu tantangan di daerah yang aksesnya lumayan jauh dari perkotaan adalah tentang ketersediaan sumber belajar berupa buku. Banyak temuan di lapangan menunjukkan, khususnya di desa, tragedi “Nol Baca” memang masih cukup banyak.

Sebagai pegiat literasi di Rumah Literasi Indonesia (RLI), selain saya berkeliling di puluhan rumah baca yang menjadi jejaring RLI, hingga mengisi seminar baik di level kota-kota besar sampai di tingkat RT, masih banyak saya temui fenomena “Nol Baca”. Ada ratusan mungkin ribuan anak-anak muda yang nyaris tak satupun menyelesaikan satu buku bacaan selama setahun. Padahal salah satu syarat penting agar wawasan bisa tumbuh adalah lewat membaca.



Meningkatkan budaya literasi masyarakat memang menjadi pekerjaan panjang. Tak heran jika data UNESCO tahun 2012 menunjukkan bahwa indeks tingkat membaca orang Indonesia hanyalah 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius. Dengan rasio ini, berarti di antara 250 juta penduduk Indonesia, hanya 250.000 yang punya minat baca. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 88,1 juta pada 2014.

Keterbatasan buku bacaan memang menjadi tantangan tersendiri, tapi hal ini bukan menjadi sumber masalah utama. Sebab, ada banyak faktor untuk membuka pintu peluang sehingga di kampung-kampung anak-anak mudanya mulai melek literasi. Sempat kami temukan justru ada sekolah negeri di salah satu desa yang letaknya sekitar 60 km dari pusat kota, belum memiliki perpustakaan yang layak sebagai pusat informasi peserta didik.

RLI yang jejaring anggotanya hingga puluhan saja masih terus berusaha untuk menghidupkan literasi melalui segala keterbatasan. Nah, anehnya instansi-instansi plat merah yang sebenarnya memiliki kemampuan fiskal dan kebijakan justru terlihat redup dalam meningkatkan gairah membaca. Taman bacaan binaan pemerintah nyaris hanya berfokus pada urusan administrasi saja, paling “*puool*” pengelolanya cuma mengurus tata letak buku lewat sistem informasi berbasis komputer. Lupa bahwa seharusnya para pengelola taman baca atau perpustakaan desa lebih bertanggungjawab terhadap makhluk kecil yang bernama anak-anak atau siapapun yang berkunjung ke pusat informasi yang akrab disebut taman baca atau perpustakaan desa.

Jika kita menengok lebih jauh lagi, terpilihnya Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu penerima penghargaan USAID Prioritas dalam kategori Kabupaten Literasi pada tahun 2017, mungkin perlu menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, membangun budaya literasi tak cukup hanya dengan menjalankan proyek yang prematur, tapi perlu upaya komprehensif yang menumbuhkan semangat gerakan mulai dari jajaran pemerintah hingga ke akar rumput.

Perda No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang dikeluarkan Banyuwangi hanya sebagai “macan ompong”. Pasal 3 yang menjelaskan bahwa, “Menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat Banyuwangi dan memenuhi hak masyarakat

Banyuwangi untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.” Tapi, fakta di lapangan menunjukkan ada banyak desa/kelurahan yang belum menyediakan kegiatan belajar melalui perpustakaan.

Melihat fenomena ini, saya semakin percaya bahwa geliat literasi masyarakat Banyuwangi akan sulit ditumbuhkan lewat instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah. Namun, geliat literasi itu akan tumbuh karena peran-peran kecil yang secara berkelanjutan dilakukan oleh para pegiat literasi, relawan dan komunitas-komunitas kreatif di gang-gang kampung, bilik-bilik rumah baca hingga menjalar ke pelosok-pelosok desa.

Program “*Smart Kampung*” yang diatur di dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016, yang begitu populis di Kota Gandrung ini ternyata lebih dominan mengatur tentang urusan sarana dan prasarana fisik. Urusan tentang mengelola sumber daya manusianya hanya sebatas pembinaan dan pengawasan dari SKPD. Belum bicara banyak terkait bagaimana upaya kolaborasi dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber lokal sehingga menjadi modal untuk mengelola manusianya.

Tahun depan, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bakal ditambah oleh pemerintahan Jokowi yang baru. Tentu ini bisa jadi peluang bahkan bisa juga menjadi tantangan. Jika semangat “*Nawacita*” betul-betul diterapkan oleh pemerintah melalui budaya reformasi birokrasi, saya masih meyakini ada

peluang besar untuk memajukan masyarakat dari skup yang paling kecil, yaitu desa.

Namun sebaliknya, jika sumber fiskal ini tidak bersinergi dengan cita-cita yang global tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak akan pernah bisa terwujud.

Untuk memastikan predikat Kabupaten Literasi betul betul membumi, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, menyadari bahwa Literasi adalah instrumen, untuk bisa bermanfaat maka sang pemilik harus memiliki dan menentukan tujuan penggunaannya. Mengingat literasi adalah jantung pendidikan, maka setiap upaya dalam membudayakan literasi harus dipastikan mengarah pada penyiapan, peningkatan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Setiap kegiatan yang diselenggarakan haruslah menggerakkan, membangkitkan antusiasme dalam menambah ilmu, mendorong keterlibatan aktif orang lain dan menebar semangat kerjasama dalam membangun masyarakatnya. Dengan kata lain, menjadi Kabupaten Literasi, tidak cukup hanya memperbanyak jumlah buku, bukan pula sebatas menambah fasilitas baca, apalagi sekedar menggandakan surat himbauan semata mata.

Lebih dari itu, ruh literasi bersifat aktif, bergerak secara konsisten menjadikan "membaca" sebagai kebutuhan bagi siapapun, memposisikan ilmu pengetahuan sebagai landasan berkarya serta menempatkan akhlak/karakter baik sebagai pedoman

dalam bermasyarakat. Bahwa dalam bermasyarakat memiliki ilmu adalah utama, memiliki keterampilan sangatlah dibutuhkan dalam era kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan semacam ini, namun karakter kepribadian yang pada akhirnya menentukan kemanfaatannya di dalam masyarakat. Dengan kata lain, karakter atau kepribadian yang baiklah yang akan menjadikan setiap kemampuan yang dimiliki mengarah pada kemaslahatan.

L U M B U N G K O M U N I T A S



Memandang BaleBengong dari Kaca Mata Saya

Iin Valentine

Pegiat media jurnalisme warga Balebengong

Berbicara tentang *BaleBengong*, sebenarnya bingung harus saya mulai dari mana. Ini pertama kalinya saya menuliskan pengalaman selama menjadi bagian dari media jurnalisme warga yang lahir 26 Juni 2007 tersebut. Kemudian semua terasa berloncatan di kepala, semacam jadi pengingat agar jari-jari ini tak lupa menuliskannya.

Ya, ini pasti jadi sangat subjektif.

Saya akan membuka tulisan ini dengan mengenang kembali awal mengenal nama *BaleBengong*. Sebenarnya itu terjadi karena suatu ketidaksengajaan. Tahun 2013, saya resmi menjadi mahasiswa baru (maba) dari Universitas Udayana. Saat itu pula, Twitter menjadi salah satu media sosial yang sedang digandrungi, termasuk oleh teman-teman kampus. Saya yang hanya memiliki akun Facebook, saat itu akhirnya mendaftarkan akun di Twitter.

Banyak orang saya ikuti. Teman kampus, teman SMA, beberapa tokoh yang saya idolakan, hingga akun-akun yang aktif *nge-tweet* humor. Nama *BaleBengong* saat itu belum saya temukan. Sampai akhirnya seorang kakak tingkat dari jurusan berbeda, menjadi jembatannya.

Sosok ini adalah “idola” saya waktu itu. Pintar, kritis, suka menulis, dan puitis. Hal-hal puitis dan kritis selalu berpeluang membuat saya suka. Begitulah dia mencuri perhatian saya. Kemudian kami berteman di media sosial. Karena rasa penasaran yang tinggi dan keinginan untuk menyempitkan ruang di antara kami, diam-diam saya mencari tahu dirinya lewat seluk beluk media sosialnya. Mulai dari akun apa saja yang ia ikuti atau sebaliknya, apa yang dibaca, yang ia *retweet*, dan *like*. Ketika mengamati siapa saja yang ia ikuti, saat itulah nama *BaleBengong* terbaca oleh saya.

Seperti ada yang aneh. Saya orang Bali, dan setahu saya, bale bengong adalah sebuah bale (tempat) yang biasa dijadikan tempat bersantai dan ngobrol-ngobrol. Menemukannya ada di jagat Twitter, jadi hal yang ganjil bagi saya. Namun keganjilan itu akhirnya makin mendorong untuk berkunjung ke halaman profilnya.

Saya amati apa saja interaksi yang terjadi. Ternyata akun ini membahas banyak hal seputar Bali, pelayanan publik, kebijakan pemerintah, bahkan hal remeh-temeh seperti tukang jahit di seputaran Denpasar, tukang tambal ban *on call* dan lainnya. Menariknya lagi, interaksi yang terjadi ini adalah dua arah. Warganet juga bisa membagi informasinya dan lanjut berdiskusi. Sebagai anak baru di kota Denpasar yang cukup ramai, saya merasa perlu banyak informasi tentang kota ini. Tombol *follow* pun saya klik agar tak ketinggalan informasinya.

Begitulah awal mula perkenalan dengan *BaleBengong*. Kemudian sesekali saya juga sempat membaca beberapa artikel yang dipublikasikan melalui *website* yang kala itu masih bernama *BaleBengong.net*.

Akhir 2016, saat masa perkuliahan sudah pada tahap akhir, saya berkeinginan untuk membuat pengalaman baru sekaligus belajar lagi. Tanpa pikir panjang, saat *BaleBengong* membuka kesempatan magang, saya bersemangat untuk mendaftar. Sebenarnya, banyak hal yang saya takutkan. Pertama, jelas karena kemampuan di bidang jurnalistik yang belum cukup mumpuni, walaupun saya belajar di Ilmu Komunikasi. Tapi, hajar saja. Saya maju terus.

Belajar Banyak Hal

Hampir tiga tahun menjadi bagian dari *BaleBengong*, memberikan saya bekal yang luar biasa. Belajar tentang banyak hal yang selama ini saya lewatkan. Ternyata, belajar di *BaleBengong*, tidak melulu dicekoki dengan teori-teori jurnalisme (seperti yang saya bayangkan sebelumnya), tetapi lebih banyak lagi aspek tentang peningkatan kapasitas dan berpikir kritis. Bahkan, saya merasa lebih banyak mendapatkan pelajaran di tempat ini daripada di ruang kelas saat itu, *hehehe*.

Dalam hal transfer pengetahuan, bagi saya *BaleBengong* selalu dengan totalitas. Tak hanya melalui sesi diskusi formal, tetapi juga melalui sesi-sesi santai dan pelatihan. Kelas menulis, pelatihan teknologi informasi, keamanan digital, jurnalisme warga, dan

lainnya. Selain untuk siswa-siswa sekolah, pelatihan semacam itu juga diberikan kepada masyarakat marjinal misalnya orang dengan HIV/AIDS (ODHA), difabel, hingga warga desa dalam usaha meningkatkan kapasitas mereka.

Dengan memberikan edukasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam aspek literasi dan informasi digital, masyarakat diharapkan mampu mengakses informasi yang lebih luas serta dapat memahami bahwa mereka tidak hanya bisa mengonsumsinya, tetapi juga turut memproduksi informasi dan menyuarakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita ada di era keterbukaan informasi, kemampuan dasar seperti menulis dan membaca menjadi hal yang sangat penting.

Program & Kolaborasi

Selain klub menulis dan pelatihan yang kami namai Kelas Asyik Teknologi Informasi (KASTI), *BaleBengong* juga memiliki beberapa program lain, di antaranya *Suka Duka di Tana Bali*, sebuah format diskusi yang menghadirkan masyarakat biasa sebagai narasumber untuk mengangkat narasi-narasi kecil yang terpinggirkan. Kami percaya, bahwa proses belajar, tidak melulu harus dari tokoh akademis atau pakar (*expert*), dari siapapun bisa. Kemudian ada juga program Lokakarya (*Workshop*) Kecil, Musik Bersuara, Saya Persma, *Interview*, hingga Anugerah Jurnalisme Warga (AJW).

AJW pertama kali dihelat tahun 2016 dengan nama Citizen Journalism Award. Ajang ini

lahir sebagai wujud apresiasi *BaleBengong* terhadap para kontributor dalam bentuk kompetisi menulis. Di tahun-tahun berikutnya, AJW mengalami beberapa pengembangan konsep dan perluasan jaringan ke tingkat nasional.

Praktik-praktik edukasi itu selalu berusaha dibawa ke jaringan yang lebih luas. Ini juga jadi salah satu hal berharga yang saya dapat dari *BaleBengong*. Ia menjembatani saya bertemu dengan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan, saya bisa bekerja sama dengan tokoh idola yang sebelumnya hanya terbayang di kepala.

Dalam setiap agendanya, *BaleBengong* memang selalu menekankan kolaborasi. Di beberapa program, *BaleBengong* sempat berkolaborasi dengan komunitas teater, sesama Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), pegiat literasi, musisi, hingga warga desa dan petani. Karena kami yakin, sebuah praktik baik, akan lebih maksimal jika dilakukan dengan lebih banyak jejaring. Dapat saling melengkapi dan menguatkan dari berbagai aspek.

Menyuarakan yang Tak Terdengar

Sejak awal saya yakin mendekatkan diri pada *BaleBengong*, karena dari amatan melalui media sosial dan situsnya, saya juga melihat bahwa *BaleBengong* adalah sebuah lembaga yang tahu dia berdiri di mana, memihak siapa.

Turut aktif pula dalam mengadvokasi isu-isu perlindungan anak & perempuan, serta selama 12 tahun sejak berdirinya, *BaleBengong*

konsisten menjunjung nilai kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan kemanusiaan. Ia berpihak pada suara-suara yang terpinggirkan. Poin-poin ini yang saya rasa seperti memanggil cita-cita saya terdahulu, ingin bergabung dengan sebuah lembaga non pemerintahan yang bergerak di isu-isu sosial dan kemanusiaan.

Tentu ini dilakukan dengan sadar demi “membangkitkan” isu-isu tersebut di tengah masyarakat kita. Mengajak masyarakat untuk sama-sama melihat dan peduli.

Menurut saya, konsistensi ini pula yang membuat *BaleBengong* mampu berdiri di tengah arus informasi yang kian deras. Namun, poin penting lainnya, bahwa sebagai sebuah media, *BaleBengong* tidak mengejar target menjadi yang tercepat untuk mengabarkan, tetapi mengabarkan sebuah informasi yang sudah terverifikasi kebenarannya.

Verifikasi menjadi hal yang utama, sebab di era tsunami informasi seperti sekarang, sangat rentan terjadi penyebaran berita bohong atau hoax. Sekali klik dan bagi, informasi bisa sampai di tangan kita dengan sangat cepat. Lalu apakah semua bisa dipertanggungjawabkan?

BaleBengong hadir sebagai alternatif ketika kecenderungan media-media *mainstream* saat ini hanya mengejar *clickbait* dengan kerap menyajikan berita sensasional. Hal ini berbeda dengan jalan yang dipilih *BaleBengong*. Jalan yang tidak populer, tapi *BaleBengong* berusaha mengabarkan hal-hal yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, saya

pikir tak salah jika *BaleBengong* akhirnya menjadi salah satu media rujukan bagi masyarakat, karena konsistensinya dalam menyajikan informasi yang terpercaya. Tidak asal bagi, selalu memverifikasi setiap informasi.

Saya senang bisa berada di tengah iklim kritis *BaleBengong*. Dari orang-orang di dalamnya, saya belajar memandang sesuatu dari sudut yang berbeda. Diskusi kritis ini, tidak hanya terjadi dalam pertemuan tatap muka, tetapi juga di dunia maya. Hingga kini, Twitter masih menjadi salah satu platform *online* yang dimanfaatkan *BaleBengong* untuk berinteraksi dengan warganet. Topik-topik diskusinya pun beragam. Mengkritisi kebijakan pemerintah, masalah lingkungan, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Fungsinya sebagai “pengawas” bahkan sampai-sampai membuat saya secara pribadi sempat merasa terus diintai. Sesederhana bagaimana kalau nanti mereka melihat saya melanggar peraturan lalu lintas? Atau bagaimana jika nanti saya dipergoki sedang boros air? Atau ketika mengambil hak orang lain? Pasti malu sekali rasanya.

Yang berusaha saya katakan di sini adalah, bagaimana kita menjalankan “kebenaran” yang selama ini didengungkan. Mengarah kepada *walk the talk*. Ini memberikan dampak positif bagi saya sebagai individu. Walaupun awalnya merasa seperti diintai, tetapi setidaknya ada usaha untuk taat. Pada diri sendiri dan hal-hal yang ada di luarnya.

Lalu saat akan mengakhiri tulisan ini, saya kembali mengingat perkenalan itu. Kini sudah tidak ada kejanggalan tentang nama *BaleBengong*. Begitulah filosofinya, seperti bale bengong tempat orang berkumpul, ngobrol, terbuka, dan egaliter, seperti yang kerap disebutkan oleh Mas Anton.

W A R T A C R I

SID Berdaya di Gunungkidul untuk Menuju Satu Data Kemiskinan



Lamia Putri Damayanti

Rujukan data yang tidak tunggal menjadi persoalan utama dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, terutama dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Perbedaan data kemiskinan di setiap kementerian dan lembaga menimbulkan masalah ketika diimplementasikan ke level pemerintahan terbawah seperti desa. Pemerintah desa kerap menemukan perbedaan data yang mereka kumpulkan sendiri dengan data dari pemerintah pusat. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan terutama terkait dengan kebijakan yang harus diambil desa dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, data yang tidak akurat juga dapat menimbulkan program bantuan yang tidak tepat sasaran.

Hal tersebut pernah terjadi di Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunungkidul pada April 2019. Dilansir dari harianjogja.com, pemerintah desa se-Kecamatan Patuk menolak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lantaran kecewa dengan sistem pendataan pemerintah terkait dengan distribusi bantuan. Pasalnya, data dari pemerintah tidak sesuai dengan data hasil Musyawarah Desa (Musdes). Akhirnya, pemerintah desa pun menolak membagikan bantuan karena khawatir akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan berharap ada basis data terpadu yang dapat dirujuk bersama.

Tumpang tindih pendataan ini semestinya dapat diselesaikan melalui Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Sebelumnya, pemerintah juga telah

mengeluarkan dua regulasi yang diharapkan akan mampu mengatasi persoalan data. Pertama adalah PP No. 17/2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Kedua adalah Perpres No. 95/2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merespons situasi tersebut, Combine Resource Institution (CRI) bersama Kabupaten Gunungkidul menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Satu Data Kemiskinan: Bagaimana Mencapainya dan untuk Siapa” di Hotel Ibis Jakarta pada Selasa, 24 September 2019.

Dalam FGD tersebut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, mengatakan bahwa pemerintah saat ini memang tengah berupaya menyelaraskan data kemiskinan dari berbagai kementerian dan lembaga. Dilansir dari Koran Tempo, upaya ini dilakukan menyusul program pengentasan masyarakat miskin yang dinilai belum tepat sasaran hingga seratus persen. “Adanya revolusi perkembangan data membantu perbaikan sasaran target program,” ujar Maliki.

Masalahnya, sebelum konsep dalam regulasi itu terwujud dan berjalan secara final, kebutuhan data untuk pelaksanaan pembangunan, terutama yang terkait dengan data kemiskinan, tidak berhenti. Selaras dengan yang disampaikan Maliki, Direktur Combine Resource Institution, Imung Yuniardi, mengatakan pemetaan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum saling terkait. Kondisi ini membuat

pemerintah daerah tidak memiliki kepastian soal data kemiskinan. Hal ini menyebabkan implementasi program pengentasan kemiskinan yang belum tepat sasaran.

“Pemerintah daerah membutuhkan kepastian siapa saja penerima bantuan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Ekonom dari Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Reno Koconegoro, menuturkan bahwa tercecernya data kemiskinan juga disebabkan oleh terlalu banyaknya pendamping dari berbagai kementerian atau lembaga yang terjun mendata hingga ke kecamatan atau desa. Menurutnya, kondisi tersebut memicu sikap apatis masyarakat desa lantaran terlalu banyak varian prosedur pendataan yang diajukan. “Padahal masalah data kemiskinan selalu berkaitan dengan verifikasi pembaruan data. Masalah tersebut bisa dijawab kalau tenaga pendamping itu bisa diintegrasikan,” ujar Reno.

Selain itu, persoalan lain terkait data kemiskinan adalah definisi kemiskinan yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Peneliti dari Lembaga Riset Sigma Phi, Muhammad Nalar, menuturkan bahwa pemerintah mesti berkomitmen atas definisi kemiskinan yang digunakan. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyelaraskan data kemiskinan yang dikumpulkan masyarakat desa dan petugas pemerintah pusat. “Data dari desa saja bisa lebih riil asalkan sinkronisasi dan verifikasi dilakukan bersama. Kenyataannya, setiap kali desa memberikan data (ke pusat), yang kembali justru data lama,” ujar Nalar.

Penolakan bantuan oleh pemerintah desa di Kecamatan Patuk juga bukan tanpa alasan. Mereka sudah memiliki data sendiri yang lebih akurat. Desa-desanya di Kabupaten Gunungkidul telah mengelola data desa secara mandiri yang berdasar perspektif kearifan lokal dengan menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya. Data dari desa kemudian diintegrasikan di level yang lebih tinggi melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB).

Melalui sistem informasi desa dan kabupaten, Kabupaten Gunungkidul telah mampu menciptakan basis data yang sesuai dan relevan dengan kondisi warganya. Hal ini penting, sebab dengan terbukanya kesempatan desa untuk memiliki, menguji sekaligus mengolah data maka kualitas data menjadi lebih baik dan perencanaan pembangunan mereka pada akhirnya juga membaik. Selain pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih baik, dengan model ini desa juga mampu bersikap kritis dan tidak sekedar pasif. Desa tidak hanya menjadi obyek dari program-program pemerintah, tetapi juga pelaku aktif yang mampu menghimpun data paling akurat untuk kesejahteraan warganya sendiri.

Model yang dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul secara syarat dan teknis data, tidaklah bertentangan dengan semua prinsip yang dimuat dalam ketiga regulasi tadi, termasuk regulasi teknis lain mengenai pendataan. "Bahkan lebih dari itu, model satu data yang dikembangkan sekaligus memenuhi prinsip dalam UU Desa sebab yang dianut adalah integrasi data dari desa," jelas Imung.



Sayangnya, data yang dikelola oleh desa masih belum mendapat legitimasi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial. Jadi, meskipun pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul telah mengumpulkan data dari warga dan menyerahkan kepada pusat, data tersebut belum dapat digunakan terutama dalam pelaksanaan program yang menggunakan dana APBN. Namun, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tetap berharap data yang telah mereka olah dan kelola dapat digunakan untuk program-program pemerintah.

Selain itu, Manajer Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas (UPSDK) CRI, Elanto Wijoyono juga mengatakan bahwa skema yang dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain. “Skema atau model data yang dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul ini dapat direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia. Tentunya dengan modifikasi kearifan lokal masing-masing terkait dengan definisi kemiskinan,” ujarnya.

W A R T A C R I

Memberdayakan Kelompok Perempuan melalui Lokakarya Keamanan Digital

Lamia Putri Damayanti

Combine Resource Institution (CRI) kembali menyelenggarakan lokakarya keamanan digital untuk perempuan pada 27 Oktober dan 03 November 2019. Kali ini, CRI berkolaborasi dengan tiga Taman Baca Masyarakat (TBM) di Yogyakarta, yakni TBM Delima (Jetis, Bantul), TBM Teras Baca Guyub Rukun dan TBM Helicopter GoBook Maos (Sedayu, Bantul). “TBM menjadi salah satu komunitas pertama yang kami jajaki karena komunitasnya yang sudah terbentuk. Sehingga kawan-kawan TBM dapat menyampaikannya ke jaringan masing-masing. Tetapi fokusnya tetap pada perempuan,” kata Maryani selaku Koordinator Pelatihan Literasi Digital.

Pelatihan literasi digital tetap menargetkan perempuan sebagai kelompok sasaran karena menjadi pihak yang paling rentan mengalami kekerasan di internet dan menjadi korban kejahatan dunia maya. Adapun partisipan dalam pelatihan tersebut adalah ibu rumah tangga. Materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut memuat tiga hal utama, yakni: keamanan data pribadi di internet (khususnya untuk media sosial), etika bermedia sosial, dan cara mengamankan gawai masing-masing.





Salah satu peserta pelatihan dari TBM Guyub Rukun, Ikhtiarisca, menyatakan bahwa kemampuan mengamankan data pribadi semakin penting di era internet. “Terutama untuk kelompok perempuan karena kami lebih rentan mendapatkan kekerasan di internet,” jelasnya se usai pelatihan.

Fokus CRI dalam lokakarya ini adalah meningkatkan kesadaran warga dalam mengamankan data pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan data pribadi semakin marak diperbincangkan. Kasus perundungan dengan membocorkan data pribadi seseorang di media sosial juga kerap terjadi. Kasus yang paling terbaru adalah jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan secara terbuka di media sosial dan marketplace. Sementara itu, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Setidaknya dengan ada lokakarya keamanan digital, warga tahu apa itu data pribadi dan bagaimana cara melindunginya,” ujar Maryani.

Sejak 2018, lokakarya keamanan digital menjadi salah satu agenda utama CRI. Lokakarya ini adalah salah satu bagian dari

program literasi digital yang mulai digarap secara serius oleh CRI. Perkembangan teknologi yang semakin masif sudah semestinya dibarengi dengan kemampuan warga dalam beradaptasi dengan teknologi. Adaptasi ini tidak hanya dalam hal penggunaan tetapi juga kemampuan literasi digital yang membantu mereka memahami teknologi digital dan dapat mengambil keputusan yang tepat atas pemahaman tersebut. Lokakarya keamanan digital menjadi rintisan awal dalam program tersebut. “Ini adalah cara kami dalam berkontribusi untuk gerakan literasi digital di Indonesia,” jelas Ferdhi F. Putra, Manajer Unit Pengelolaan Informasi Komunitas (UPIK) CRI.



kombinasi

KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

Kombinasi (Komunitas Membangun Jaringan Informasi) adalah majalah yang diterbitkan Combine Resource Institution (CRI) sebagai media untuk menyebarkan gagasan, inspirasi, serta pengetahuan tentang pengelolaan informasi dan sumber daya berbasis komunitas. Majalah ini diterbitkan sebagai salah satu upaya mendorong warga untuk mengakses, mengelola, dan menyebarkan informasi agar menjadi mandiri dan berdaya. Edisi pertama Majalah Kombinasi terbit pada April 2001

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MEDIA DAN PEWARTA WARGA

